

Analisis Ketahanan Pangan di Provinsi Riau: Suatu Tinjauan Literatur

Juliani Sati Handayani¹, Azharuddin M Amin², Septina Elida³

Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Universitas Islam Riau

e-mail: juliani_sati@student.uir.ac.id¹⁾ azharuddin@agr.uir.ac.id²⁾

septinaelida@agr.uir.ac.id³⁾

ABSTRAK

Provinsi Riau menghadapi tantangan ketahanan pangan yang ditandai oleh penurunan produksi tanaman pangan rata-rata 9,14% per tahun selama periode 2020–2024, sementara kebutuhan pangan meningkat sebesar 1,27% per tahun sehingga pada tahun 2024 terjadi defisit pangan sebesar 319.834,60 ton. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kemampuan wilayah dalam mempertahankan ketahanan pangan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat ketahanan pangan pada 10 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Riau berdasarkan dimensi ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan kuantitatif dengan data sekunder tahun 2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, dan instansi terkait. Analisis dilakukan melalui penyusunan indeks komposit mengacu pada indikator *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki indeks ketahanan pangan sebesar 79,89 dan tergolong dalam kategori sangat tahan pangan. Namun demikian, masih terdapat disparitas ketahanan pangan antarwilayah, dimana Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti berada pada kategori rentan, sedangkan Siak, Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Pekanbaru, dan Dumai tergolong sangat tahan pangan. Temuan penelitian menegaskan bahwa tingginya ketahanan pangan Provinsi Riau tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi lebih dipengaruhi oleh dimensi akses dan pemanfaatan pangan yang relatif lebih baik. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan daerah memerlukan kebijakan yang terintegrasi melalui peningkatan produksi pangan lokal, pemerataan infrastruktur dasar, penguatan daya beli masyarakat, dan perbaikan layanan kesehatan serta sanitasi.

Kata kunci: Ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Pemanfaatan Pangan.

ABSTRACT

Riau Province faces food security challenges characterized by an average decline in food crop production of 9.14% per year during the 2020–2024 period, while food demand is increasing by 1.27% per year, resulting in a food deficit of 319,834.60 tons by 2024. This situation raises questions regarding the extent to which the region is capable of maintaining comprehensive food security. This study aims to analyze the level of food security in 10 regencies and 2 cities in Riau Province based on the dimensions of food availability, food access, and food utilization. The study employed a quantitative literature review method using secondary data from 2024 sourced from the Central Statistics Agency, the National Food Agency, and relevant institutions. Analysis was conducted through the development of a composite index based on indicators from the *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA). The results indicate that Riau Province has a food security index of 79.89 and falls into the “highly food-secure” category. However, disparities in food security persist across regions, with Indragiri Hulu and Kepulauan Meranti classified as “vulnerable,” while Siak, Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Pekanbaru, and Dumai are categorized as “highly food-secure.” The study’s findings confirm that Riau Province’s high food security is not solely determined by food availability but is more influenced by relatively better dimensions of food access and utilization. Therefore, strengthening regional food security requires integrated policies through increased local food production, equitable distribution of basic

infrastructure, enhanced community purchasing power, and improvements in health services and sanitation.

Keywords: Food Security, Food Availability, Food Access, Food Utilization.

I. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan wilayah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, stabilitas sosial-ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketahanan pangan tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya pangan dalam jumlah cukup, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang aman, bergizi, beragam, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa ketahanan pangan dibangun atas tiga pilar utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

Secara konseptual, ketahanan pangan bersifat multidimensional dan saling berkaitan antar aspek. Burki (2022) menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan prasyarat utama pembangunan manusia karena berkorelasi dengan status kesehatan, produktivitas tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Peng dan Berry (2018) menegaskan bahwa gangguan pada satu dimensi ketahanan pangan dapat menurunkan kapasitas rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan gizi yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, pengukuran ketahanan pangan memerlukan pendekatan yang komprehensif agar dapat menggambarkan kondisi riil suatu wilayah secara menyeluruh.

Di Provinsi Riau, dinamika ketahanan pangan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Produksi tanaman pangan selama periode 2020–2024 mengalami penurunan rata-rata sebesar 9,14% per tahun. Sebaliknya, kebutuhan pangan meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi sebesar 1,27% per tahun. Kondisi ini menyebabkan defisit pangan mencapai 319.834,60 ton pada tahun 2024. Ketidakseimbangan antara produksi dan kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa aspek ketersediaan pangan di Provinsi Riau masih menghadapi tekanan yang cukup besar. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Produksi dan Kebutuhan Tanaman Pangan Provinsi Riau Tahun 2024

No	Jenis Pangan	Produksi (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Selisih (Ton)
1	Padi	222.055,71	532.034,01	-309.978,30
2	Jagung	8.201,20	15.501,43	-7.300,23
3	Ubi Kayu	52.850,85	31.689,12	21.161,73
4	Ubi Jalar	4.692,85	19.955,40	-15.262,55
5	Kacang Tanah	490,00	1.708,92	-1.218,92
6	Kacang Kedelai	267,00	235,48	31,52
7	Kacang Hijau	133,00	7.400,86	-7.267,86
Jumlah		288.690,61	608.525,21	-319.834,60

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2024 dan Outlook Pangan Kementerian Pertanian, 2025

Selain aspek ketersediaan, ketahanan pangan di Provinsi Riau juga dipengaruhi oleh aspek akses dan pemanfaatan pangan. Tingkat kemiskinan, tingginya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta belum meratanya layanan kesehatan dan pendidikan menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan pangan secara optimal. Hendriadi dan Ariani (2024) menegaskan bahwa kerawanan pangan rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pasokan pangan, tetapi juga oleh lemahnya daya beli, distribusi, dan kualitas lingkungan pendukung konsumsi pangan.

Meskipun Badan Pangan Nasional telah menerbitkan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* sebagai instrumen pemetaan ketahanan pangan nasional, kajian empiris yang

secara khusus menganalisis ketahanan pangan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan pendekatan indeks komposit masih relatif terbatas. Sebagian penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek produksi pangan atau kemiskinan secara parsial sehingga belum mampu menggambarkan keterkaitan utuh antara dimensi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk menghasilkan pemetaan ketahanan pangan yang lebih komprehensif dan spesifik wilayah sebagai dasar perumusan kebijakan pangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan pada 10 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Riau berdasarkan tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan melalui pendekatan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang akurat bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Provinsi Riau.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Riau. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam periode tahun 2024 yang mencakup data dari 10 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Riau. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, serta publikasi kementerian dan lembaga terkait lainnya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada panduan FSVA, mencakup tiga aspek utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Indikator ketahanan pangan berdasarkan FSVA dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Indikator Ketahanan Pangan Berdasarkan FSVA

Aspek Ketahanan Pangan	Indikator
Ketersediaan Pangan	a. Rasio Konsumsi per Kapita Terhadap Produksi beras, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar, serta Stok beras pemerintah daerah dan bantuan pangan
Akses Pangan	b. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan c. Persentase pengeluaran pangan rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran d. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
Pemanfaatan Pangan	e. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun f. Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih g. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk h. Persentase balita stunting i. Angka harapan hidup pada saat lahir

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Pengukuran tingkat ketahanan pangan dilakukan dengan menyusun indeks komposit berdasarkan sembilan indikator ketahanan pangan sebagaimana ditetapkan Badan Pangan Nasional (2024). Penyusunan indeks ini menggunakan metode pembobotan yang mengacu pada pendekatan *Global Food Security Index* (GFSI) dari *The Economist Intelligence Unit* (EIU). Goodridge (2007) menegaskan bahwa jika variabel penyusun indeks memiliki skala berbeda, maka komposit harus dihitung secara tertimbang agar mencerminkan kontribusi relatif masing-masing indikator. Langkah-langkah perhitungan analisis komposit sebagai berikut:

1. Standarisasi nilai indikator dengan metode *distance to scale* (0-100) menggunakan rumus *min-max normalization*.
2. Pemberian bobot indikator berdasarkan rekomendasi para ahli (*expert judgement*).
3. Menghitung skor komposit dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y_j = \sum_{i=1}^9 a_i \times S_{ij}$$

Keterangan:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i

S_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j

I : Indikator ke 1, 2, 3, ... , 9

J : Kabupaten ke 1, 2, ... , 10; Kota ke 1, 2

- Mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam enam kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* skor komposit.

Tabel 3. Cut off Point Skor Komposit

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Kondisi Relatif
1	≤ 41,52	≤ 28,84	Sangat Rentan Pangan
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	Rentan Pangan
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	Agak Rentan Pangan
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	Cukup Tahan Pangan
5	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64	Tahan Pangan
6	> 75,68	> 70,64	Sangat Tahan Pangan

Sumber: Badan Pangan Nasional 2024

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan dimensi pertama dalam sistem ketahanan pangan yang menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menjamin ketersediaan pangan fisik dari berbagai sumber, baik yang berasal dari produksi domestik, cadangan pangan, maupun impor. Menurut FAO, IFAD, UNICEF, (2023), ketersediaan pangan dianggap terpenuhi apabila pasokan pangan dari seluruh sumber mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam jumlah, kualitas gizi, dan kontinuitas yang cukup. Indikator yang digunakan dalam aspek ketersediaan di Provinsi Riau, yaitu: (1) Rasio Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Produksi Pangan, (2) Rasio Ketersediaan Energi terhadap Kebutuhan Standar, (3) Rasio Ketersediaan Protein terhadap Kebutuhan Standar, (4) Cadangan Pangan, dan (5) Impor Pangan. Hasil perhitungan kelima indikator tersebut menghasilkan nilai indeks komposit yang menggambarkan tingkat ketahanan pangan dari sisi ketersediaan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Indeks Komposit Aspek Ketersediaan Pangan Masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Indeks Aspek Ketersediaan Pangan					Total Indeks Indikator	Bobot	Indeks Komposit
		1	2	3	4	5			
1	Kuantan Singingi	0,02	0,55	0,44	0,13	0,78	1,91	0,30	0,57
2	Indragiri Hulu	0,19	0,25	0,00	0,01	0,57	1,02	0,30	0,31
3	Indragiri Hilir	0,00	0,29	0,04	1,00	1,00	2,33	0,30	0,70
4	Pelalawan	0,01	0,63	0,45	0,26	0,94	2,29	0,30	0,69
5	Siak	0,03	0,84	0,78	0,42	0,83	2,90	0,30	0,87
6	Kampar	0,11	0,10	0,03	0,37	0,28	0,88	0,30	0,26
7	Rokan Hulu	0,16	0,96	0,71	0,04	0,00	1,87	0,30	0,56
8	Bengkalis	0,06	1,00	1,00	0,53	0,12	2,71	0,30	0,81
9	Rokan Hilir	0,03	0,43	0,39	0,67	1,00	2,52	0,30	0,76
10	Kepulauan Meranti	0,05	0,43	0,16	0,00	0,83	1,46	0,30	0,44
11	Pekanbaru	1,00	0,00	0,40	0,00	0,32	1,72	0,00	0,00

No	Kabupaten/Kota	Indeks Aspek Ketersediaan Pangan					Total Indeks Indikator	Bobot	Indeks Komposit
		1	2	3	4	5			
12	Dumai	0,11	0,54	0,74	0,03	0,45	1,88	0,00	0,00
Provinsi Riau		0,15	0,50	0,43	0,29	0,59	1,96		0,50

Keterangan: 1) Rasio konsumsi normatif pangan serelia
 2) Rasio energi pangan terhadap kebutuhan standar
 3) Rasio protein pangan terhadap kebutuhan standar
 4) Cadangan beras
 5) Impor beras

Sumber: Data Olahan (2025)

Ketersediaan pangan di Provinsi Riau tahun 2024 berada pada kategori sedang dengan indeks komposit sebesar 0,50, yang menunjukkan bahwa kemampuan wilayah dalam menjamin kecukupan pasokan pangan belum sepenuhnya merata. Kabupaten Siak dan Bengkalis menjadi daerah dengan tingkat ketersediaan pangan tertinggi, masing-masing sebesar 0,87 dan 0,81, diikuti Rokan Hilir (0,76), Indragiri Hilir (0,70), dan Pelalawan (0,69). Tingginya indeks pada wilayah tersebut mencerminkan kondisi pasokan pangan yang relatif lebih baik ditinjau dari kecukupan energi, protein, cadangan pangan, serta rendahnya ketergantungan terhadap pasokan luar. Sebaliknya, Kampar (0,26), Indragiri Hulu (0,31), dan Kepulauan Meranti (0,44) menunjukkan kondisi yang masih kurang optimal, sedangkan Kota Pekanbaru dan Kota Dumai memperoleh indeks 0,00 karena karakteristik wilayah perkotaan yang tidak bertumpu pada produksi pangan primer dan lebih bergantung pada distribusi dari wilayah hinterland. Kondisi ini menegaskan bahwa aspek ketersediaan pangan di Provinsi Riau masih menunjukkan ketimpangan spasial antarwilayah. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Helmi et al., 2025) Juliannisa et al (2025) yang menyatakan bahwa kerentanan pangan regional di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas produksi, cadangan pangan, dan kemampuan daerah dalam menjaga keberlanjutan pasokan antarwilayah.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa daerah yang memiliki dukungan produksi lokal, cadangan pangan, dan kecukupan gizi yang lebih baik cenderung memiliki tingkat ketersediaan pangan yang lebih tinggi, sedangkan wilayah yang bergantung pada pasokan eksternal lebih rentan mengalami gangguan ketersediaan pangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Riau perlu diarahkan pada penguatan sentra produksi pangan, pembangunan cadangan pangan pemerintah, serta perbaikan sistem logistik distribusi, terutama pada wilayah yang masih memiliki indeks rendah. Temuan ini juga didukung oleh Helmi et al (2025) pada kawasan metropolitan PEKANSIKAWAN di Riau yang menegaskan bahwa sinergi antarwilayah produksi dan konsumsi melalui penguatan rantai pasok regional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan secara berkelanjutan.

Aspek Akses Pangan

Akses pangan merupakan kemudahan sebuah rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga terjangkau (Nurleli et al, 2022). Hasil analisis indeks komposit aspek akses pangan di Provinsi Riau yang dibangun dari tiga indikator utama yaitu persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, dan proporsi pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga, menunjukkan adanya variasi tingkat ketahanan pangan antar kabupaten/kota. Indeks komposit ini menggambarkan kemampuan ekonomi dan infrastruktur dasar rumah tangga dalam mengakses pangan secara berkelanjutan. Semakin tinggi nilai indeks komposit, maka semakin baik tingkat akses pangan suatu wilayah. Adapun status ketahanan pangan berdasarkan indeks komposit aspek

akses pangan antar kabupaten dan kota di Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Indeks Komposit Aspek Akses Pangan Masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Indeks Aspek Akses Pangan			Total Indeks Indikator	Bobot Indikator	Indeks Komposit
		1	2	3			
1	Kuantan Singingi	0,76	0,52	0,97	2,25	0,30	0,68
2	Indragiri Hulu	0,86	0,61	0,43	1,89	0,30	0,57
3	Indragiri Hilir	0,87	0,87	0,88	2,62	0,30	0,79
4	Pelalawan	0,73	0,45	0,00	1,18	0,30	0,35
5	Siak	0,90	0,68	1,00	2,59	0,30	0,78
6	Kampar	0,81	0,92	0,98	2,71	0,30	0,81
7	Rokan Hulu	0,68	0,70	0,50	1,88	0,30	0,56
8	Bengkalis	0,84	0,78	0,44	2,06	0,30	0,62
9	Rokan Hilir	0,81	0,80	0,22	1,83	0,30	0,55
10	Kepulauan Meranti	0,00	0,00	0,28	0,28	0,30	0,08
11	Pekanbaru	1,00	1,00	1,00	3,00	0,45	1,35
12	Dumai	1,00	0,32	1,00	2,32	0,45	1,04
Provinsi Riau		0,77	0,64	0,64	2,05		0,68

Keterangan: 1) Penduduk miskin
 2) Proporsi pengeluaran pangan
 3) Rumah tangga tanpa akses listrik

Sumber: Data Olahan (2025)

Indeks komposit aspek akses pangan Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 0,68 menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan berada pada kategori cukup, namun masih terdapat ketimpangan antarwilayah. Kota Pekanbaru dan Dumai memiliki indeks akses pangan tertinggi masing-masing sebesar 1,35 dan 1,04, yang menandakan bahwa tingkat kemiskinan relatif rendah, proporsi pengeluaran pangan lebih terkendali, serta dukungan infrastruktur dasar terutama akses listrik sudah memadai. Pada wilayah kabupaten, Kampar (0,81), Indragiri Hilir (0,79), dan Siak (0,78) juga menunjukkan kondisi akses pangan yang baik. Sebaliknya, Kepulauan Meranti memiliki indeks komposit terendah sebesar 0,08, diikuti Pelalawan (0,35), yang mengindikasikan bahwa masyarakat pada wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan daya beli, tingginya beban pengeluaran pangan, serta belum optimalnya infrastruktur dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pangan di Provinsi Riau tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi rumah tangga dan kemudahan masyarakat menjangkau sumber pangan.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah, proporsi pengeluaran pangan yang lebih kecil, dan infrastruktur dasar yang baik cenderung memiliki akses pangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan keterbatasan ekonomi dan fasilitas penunjang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Juliannisa et al (2025) menunjukkan bahwa kerentanan pangan regional di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemiskinan, tingginya pengeluaran pangan rumah tangga, dan keterbatasan infrastruktur pasar maupun layanan dasar, sehingga daerah dengan kondisi sosial ekonomi lemah cenderung lebih rentan mengalami hambatan akses pangan. Oleh karena itu, peningkatan akses pangan di Provinsi Riau perlu difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, stabilisasi harga pangan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar

terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang masih tertinggal agar pemerataan akses pangan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Aspek Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan merupakan dimensi ketahanan pangan yang berkaitan dengan cara pangan dikonsumsi, diolah, dan dimanfaatkan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Aspek ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan dan akses pangan, tetapi juga dipengaruhi oleh pola konsumsi, pengetahuan gizi, kebersihan pangan, kondisi kesehatan, ketersediaan air bersih, dan layanan kesehatan (Smith & Haddad, 2015). Hasil analisis indeks komposit pada aspek pemanfaatan pangan di Provinsi Riau menunjukkan adanya variasi tingkat ketahanan pangan antar kabupaten dan kota berdasarkan indikator-indikator yang digunakan, yaitu rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk, persentase balita stunting, dan angka harapan hidup pada saat lahir. Adapun status ketahanan pangan berdasarkan indeks komposit aspek pemanfaatan pangan antar kabupaten dan kota di Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Indeks Komposit Aspek Pemanfaatan Pangan Masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Indeks Aspek Pemanfaatan Pangan					Total Indeks Indikator	Bobot Indikator	Indeks Komposit
		1	2	3	4	5			
1	Kuantan Singingi	0,36	0,41	0,63	0,14	0,20	1,75	0,40	0,70
2	Indragiri Hulu	0,23	0,00	0,91	0,52	0,50	2,16	0,40	0,86
3	Indragiri Hilir	0,00	0,78	0,95	0,00	0,05	1,78	0,40	0,71
4	Pelalawan	0,31	0,26	0,78	0,78	0,77	2,90	0,40	1,16
5	Siak	0,56	0,64	0,87	0,55	0,69	3,31	0,40	1,32
6	Kampar	0,44	0,83	1,00	1,00	0,65	3,93	0,40	1,57
7	Rokan Hulu	0,31	0,72	0,97	0,54	0,52	3,07	0,40	1,23
8	Bengkalis	0,46	0,82	0,74	0,91	0,73	3,65	0,40	1,46
9	Rokan Hilir	0,21	0,42	0,65	0,19	0,56	2,03	0,40	0,81
10	Kepulauan Meranti	0,13	0,72	0,79	0,47	0,00	2,11	0,40	0,84
11	Pekanbaru	1,00	1,00	0,00	0,82	1,00	3,82	0,55	2,10
12	Dumai	0,64	0,78	0,61	0,63	0,70	3,36	0,55	1,85
Provinsi Riau		0,39	0,62	0,74	0,55	0,53	2,82		1,22

Keterangan: 1) Rata-rata lama sekolah perempuan
 2) Rumah tangga tanpa akses air bersih
 3) Rasio tenaga kesehatan
 4) Balita *stunting*
 5) Angka harapan hidup

Sumber: Data Olahan (2025)

Indeks komposit aspek pemanfaatan pangan Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 1,22 menunjukkan bahwa pemanfaatan pangan berada pada kategori cukup baik, namun masih terdapat ketimpangan capaian antarwilayah. Kota Pekanbaru dan Dumai memiliki indeks komposit tertinggi masing-masing sebesar 2,10 dan 1,85, diikuti Kampar (1,57), Bengkalis (1,46), dan Siak (1,32). Tingginya nilai pada wilayah tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan pangan didukung oleh kondisi pendidikan perempuan yang lebih baik, akses air bersih dan layanan kesehatan yang lebih memadai, angka harapan hidup yang tinggi, serta prevalensi stunting yang relatif lebih rendah. Sebaliknya, Kuantan Singingi (0,70), Indragiri Hilir (0,71), Rokan Hilir (0,81), dan Kepulauan Meranti (0,84) menunjukkan indeks yang

relatif lebih rendah, yang menandakan masih adanya keterbatasan dalam kualitas layanan dasar dan kondisi sosial penunjang pemanfaatan pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada kemampuan rumah tangga dalam mengonsumsi pangan secara sehat, bergizi, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa wilayah dengan akses pendidikan, sanitasi, layanan kesehatan, dan status gizi masyarakat yang lebih baik cenderung memiliki tingkat pemanfaatan pangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar. Hal ini sejalan dengan penelitian Astuti et al (2025) menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia yang memiliki keterbatasan akses air minum layak, sanitasi, layanan kesehatan, dan pendidikan kepala rumah tangga cenderung lebih rentan mengalami kerawanan pangan. Oleh karena itu, peningkatan pemanfaatan pangan di Provinsi Riau perlu diarahkan pada penguatan layanan kesehatan dasar, perluasan akses air bersih dan sanitasi, penurunan prevalensi stunting, serta peningkatan pendidikan perempuan agar kualitas konsumsi dan status gizi masyarakat dapat meningkat secara merata.

Indeks Ketahanan Pangan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai ketahanan pangan pada aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan maka diperoleh indeks ketahanan pangan di Provinsi Riau tahun 2024. Status ketahanan pangan Provinsi Riau diperoleh dengan analisis secara rinci dengan menghitung indeks ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Adapun analisis indeks ketahanan pangan menurut kabupaten dan kota di Provinsi Riau tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Analisis Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Indeks Aspek Akses Pangan			Total Indeks	Indeks Komposit Ketahanan Pangan (Indek × 100)	Kondisi Relatif Ketahanan Pangan
		1	2	3			
1	Kuantan Singingi	0,57	0,68	0,70	0,65	64,95	Cukup Tahan Pangan
2	Indragiri Hulu	0,31	0,57	0,86	0,58	57,91	Agak Rentan Pangan
3	Indragiri Hilir	0,70	0,79	0,71	0,73	73,14	Tahan Pangan
4	Pelalawan	0,69	0,35	1,16	0,73	73,40	Tahan Pangan
5	Siak	0,87	0,78	1,32	0,99	98,88	Sangat Tahan Pangan
6	Kampar	0,26	0,81	1,57	0,88	88,25	Sangat Tahan Pangan
7	Rokan Hulu	0,56	0,56	1,23	0,78	78,32	Sangat Tahan Pangan
8	Bengkalis	0,81	0,62	1,46	0,96	96,41	Sangat Tahan Pangan
9	Rokan Hilir	0,76	0,55	0,81	0,71	70,56	Tahan Pangan
10	Kepulauan Meranti	0,44	0,08	0,84	0,45	45,47	Rentan Pangan
11	Pekanbaru	0,00	1,35	2,10	1,15	115,03	Sangat Tahan Pangan
12	Dumai	0,00	1,04	1,85	0,96	96,38	Sangat Tahan Pangan
Provinsi Riau		0,50	0,68	1,22	0,80	79,89	Sangat Tahan Pangan

Keterangan: 1) Ketersediaan Pangan
2) Akses Pangan
3) Pemanfaatan Pangan

Sumber: Data Olahan (2025)

Indeks ketahanan pangan gabungan Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 79,89 yang termasuk dalam kategori sangat tahan pangan, menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Riau memiliki kondisi ketahanan pangan yang relatif baik berdasarkan akumulasi aspek ketersediaan pangan (0,50), akses pangan (0,68), dan pemanfaatan pangan (1,22). Meskipun

pada tahun 2024 Provinsi Riau masih mengalami defisit tanaman pangan sekitar 319.834,60 ton sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan penduduk, kondisi tersebut tidak serta-merta menurunkan status ketahanan pangan provinsi karena kebutuhan pangan masyarakat masih dapat ditopang melalui pasokan dari luar daerah, kelancaran distribusi, daya beli rumah tangga, serta kualitas pemanfaatan pangan yang relatif baik. Kabupaten Siak menjadi wilayah dengan indeks ketahanan pangan tertinggi sebesar 98,88, diikuti Bengkalis (96,41), Dumai (96,38), Kampar (88,25), dan Rokan Hulu (78,32) yang berada pada kategori sangat tahan pangan. Sementara itu, Indragiri Hilir (73,14), Pelalawan (73,40), dan Rokan Hilir (70,56) termasuk kategori tahan pangan, Kuantan Singingi (64,95) berada pada kategori cukup tahan pangan, Indragiri Hulu (57,91) agak rentan pangan, dan Kepulauan Meranti (45,47) merupakan wilayah paling rentan. Hasil ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan antarwilayah di Provinsi Riau masih mengalami ketimpangan yang dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan pada masing-masing dimensi penyusunnya.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa wilayah yang memiliki keseimbangan antara ketersediaan pangan, kemudahan akses ekonomi, dan kualitas pemanfaatan pangan cenderung menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang hanya unggul pada satu dimensi saja. Kondisi ini sejalan dengan pendapat *Food and Agriculture Organization* yang menegaskan bahwa ketahanan pangan tercapai apabila seluruh masyarakat memiliki pangan yang tersedia, mampu diakses, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kehidupan yang sehat. Selain itu, penelitian Helmi et al (2025) menunjukkan bahwa ketahanan pangan regional di Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh sinergi antara wilayah sentra produksi, pusat distribusi, dan kualitas layanan dasar masyarakat, sehingga ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan pangan daerah. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan di Provinsi Riau perlu dilakukan melalui kebijakan berbasis wilayah dengan menitikberatkan pada peningkatan produksi pangan di daerah defisit, penguatan daya beli masyarakat, pemerataan layanan kesehatan dan sanitasi, serta perbaikan jaringan distribusi terutama pada wilayah pesisir dan kepulauan agar ketahanan pangan dapat terwujud secara lebih merata dan berkelanjutan.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Tingkat ketahanan pangan Provinsi Riau tahun 2024 berada pada kategori Sangat Tahan Pangan dengan nilai indeks komposit sebesar 79,89. Meskipun demikian, capaian tersebut belum mencerminkan pemerataan kondisi ketahanan pangan antarwilayah. Secara spasial masih ditemukan disparitas, dimana sebagian kabupaten/kota seperti Siak, Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai memiliki tingkat ketahanan pangan sangat tinggi, sementara Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti masih berada pada kategori agak rentan hingga rentan pangan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa ketahanan pangan daerah tidak semata ditentukan oleh kecukupan produksi pangan, tetapi lebih dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan pangan secara memadai. Dengan demikian, persoalan utama ketahanan pangan di Provinsi Riau terletak pada ketimpangan distribusi capaian pembangunan antarwilayah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur dasar, serta kualitas layanan kesehatan dan sanitasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat ketahanan pangan di Provinsi Riau, disarankan agar pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota menyusun kebijakan ketahanan pangan yang diarahkan pada strategi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan

produksi pangan, tetapi juga pada penguatan dimensi akses dan pemanfaatan pangan sebagai faktor penentu utama. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan intervensi pada wilayah yang masih rentan melalui optimalisasi produksi pangan lokal, penguatan jaringan distribusi dan cadangan pangan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar, sanitasi, dan layanan kesehatan. Di sisi lain, pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat harus menjadi agenda utama agar kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan dapat meningkat secara berkelanjutan. Pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ketahanan pangan antarwilayah dan mendorong terciptanya ketahanan pangan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Astuti, A. A., Sudrajat., & Pangaribowo, E. H. 2025. Kerawanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2024 (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*). Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Badan Pangan Nasional. 2024. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (FSVA) Tahun 2024. Jakarta: Badan Pangan Nasional.
- Burki, T. 2022. *Food security and nutrition in the world*. In *The Lancet Diabetes and Endocrinology*, 10(9). Online pada [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(22\)00220-0](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00220-0).
- FAO, IFAD, UNICEF, W. and W. 2023. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum. In *Fao*. Online pada <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cc3017en>.
- Goodridge P. 2007. *Method explained index number, economic and labour*. *Market Review*. 1(3): 54- 57.
- Helmi, F., Rustiadi, E., Juanda, B., & Mulatsih, S. 2025. *Determination of Leading Commodity for Food Security in the PEKANSIKAWAN Metropolitan Area*.
- Hendriadi, A., & Ariani, M. 2024. Pengentasan Rumah Tangga Rentan Pangan dan Gizi: Besaran, Penyebab, Dampak, dan Kebijakan Food and Nutrition. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 38(1): 13–27. Online pada <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/3546>.
- Juliannisa, I. A., Rahma, H., & Mulatsih, S. 2025. *Regional Vulnerability to Food Insecurity : The Case of Indonesia*. 1–20.
- Nurleli, Wahyuni, A., Pawenrusi, E. P., & Sudariari. 2022. Gambaran Kecukupan Pangan dalam Pemenuhan Status Gizi Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keperawatan*, 14(3), 748.
- Peng, W., & Berry, E. M. 2018. *The Concept of Food Security*. In *Encyclopedia of Food Security and Sustainability* (Vol. 2). Elsevier. Online pada <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.22314-7>.
- Smith, L. C., & Haddad, L. 2015. *Reducing Child Undernutrition: Past Drivers and Priorities for the Post-MDG Era*. *World Development*, 68(1): 180–204. Online pada <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.11.014>